



2016

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA****B1**

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 26 Agustus 2016 No. 68

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Ir. H.KOESMAYADIE TATANG PADMADINATA
2. Jabatan : KEPALA BADAN - KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV - SEKRETARIAT DAERAH
3. NHK : 127980
4. Alamat Kantor : Jl. A. YANI NO. 21, GARUT
5. Tanggal Pelaporan : 30 Desember 2010, 19 Mei 2015

Status Laporan

	30 Desember 2010	19 Mei 2015
II. DATA HARTA		
A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 189.510.000	Rp. 392.340.000

1. Tanah & Bangunan seluas 180 m2 & 110 m2, di Kabupaten BANDUNG, yang berasal dari WARISAN, perolehan tahun 1986
Rp. 47.580.000 | Rp. 47.580.000
2. Tanah seluas 1.050 m2 ; di Kabupaten BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010
Rp. 44.760.000 | Rp. 44.760.000

127980

Status Laporan

30 Desember 2010

19 Mei 2015

- | | 30 Desember 2010 | 19 Mei 2015 |
|---|------------------|-----------------|
| 3. Tanah & Bangunan seluas 90 m2 & 45 m2, di Kota BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2007 sampai dengan 2014 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) | Rp. 97.170.000 | Rp. 300.000.000 |

B. HARTA BERGERAK**a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA**

- | | | |
|--|----------------|-----------------|
| 1. Motor, merk KAWASAKI, tahun pembuatan 2010, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010 | Rp. 48.000.000 | Rp. 48.000.000 |
| 2. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2007 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 |
| 3. Mobil, merk TOYOTA RUSH, tahun pembuatan 2014, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 (Penambahan Data Baru) | ---- | Rp. 185.000.000 |
| 4. Mobil, merk TOYOTA AVANZA, tahun pembuatan 2014, yang berasal dari —, perolehan tahun 2014 (Penambahan Data Baru) | ---- | Rp. 130.000.000 |

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA**c. HARTA BERGERAK LAINNYA**

- | | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1982 sampai dengan 2013 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) | Rp. 30.000.000 | Rp. 19.500.000 |
| | Rp. 18.000.000 | Rp. 7.500.000 |

127980	Status Laporan	
	30 Desember 2010	19 Mei 2015
2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1982 sampai dengan 2010	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
C. SURAT BERHARGA	Rp. 18.000.000	Rp. 0
1. Tahun investasi dari 2009 sampai dengan 2010 yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 18.000.000	----
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 142.992.439	Rp. 292.992.439
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan)	Rp. 113.247.635	Rp. 263.247.635
2. Yang berasal dari HIBAH	Rp. 18.990.621	Rp. 18.990.621
3. Yang berasal dari ---	Rp. 10.753.983	Rp. 10.753.983
E. PIUTANG	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL HARTA (II)	Rp. 435.602.439	Rp. 1.074.832.439
III. HUTANG	Rp. 150.600.612	Rp. 230.600.612
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Hutang baru)	Rp. 68.699.398	Rp. 168.699.398
2. Hutang dalam bentuk PINJAMAN BARANG	Rp. 61.901.214	Rp. 61.901.214
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 284.901.827	Rp. 844.231.827

Buletin Pengumuman Pejabat Publik
Tersurat 26 Agustus 2015 No.02



Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis